

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini dunia semakin maju dan berkembang, begitu juga dengan teknologi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya. Keadaan itu membawa manusia memasuki era digital dimana teknologi menjadi alat yang sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Era digital ditandai dengan media komputer dan jaringan internet. Kemudian melihat kondisi geografis Negara Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan manusia. Media massa beralih ke media internet untuk penyampaian informasi. Kemunculan era digital ini pun membawa dampak munculnya tantangan-tantangan baru bagi semua aspek kehidupan. Baik dari aspek ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, politik serta teknologi informasi itu sendiri.

Pemerintah di seluruh dunia pun kini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ada di era digital. Sama halnya dengan Pemerintah Indonesia yang terus dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih aktif dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat untuk masyarakatnya. Seperti tercatat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menimbang pada butir b yang menyatakan bahwa “membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.” Dalam pernyataan tersebut diartikan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

Kualitas pelayanan publik merupakan perhatian penting pemerintah yang harus terus ditingkatkan. Pelayanan publik adalah hak sosial dasar yang dimiliki masyarakat (*social rights*). Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 butir 1 yaitu

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Maka, pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan baik berbentuk barang maupun jasa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Terkait dengan pelayanan publik, di era digital ini pemerintah Indonesia mulai menerapkan suatu sistem yang dikenal dengan istilah *e-Government*. Penerapan *e-Government* adalah sebagai salah satu bentuk pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka merupakan suatu gagasan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengakses dokumen dan berpartisipasi pada proses pemerintahan. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menimbang pada butir b bahwa “hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.” Dari pernyataan diatas pemerintah meyakini dengan keterbukaan suatu pemerintahan, akan semakin mudah penyelesaian masalah dimasyarakat dan pelayanan akan lebih baik lagi.

Istilah *e-Government* sendiri mengacu pada cukup banyak definisi. Istilah yang berawalan ‘e’ biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Indrajit, Rudianto, dan Zainuddin (2005) mengatakan bahwa “konsep *e-Government* mengandung arti bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer” nya”. Dan Kebijakan mengenai penataan *e-government* telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*. Di

Tin Febriyanti, 2020

PENGLOLAAN PELATIHAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SILAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa “*electronic government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.”

Pada Adriwati (2011) *electronic government* diperuntukkan ke dalam

- (a) pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan pemerintah kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; dan (c) pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya. (hlm. 300).

Dengan kata lain bahwa pelayanan berbasis e-government ini merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pelayanan publik.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga membawa dampak yang besar dan menghasilkan tuntutan bagi setiap organisasi untuk dapat bertahan dan tetap eksis melalui inovasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat di era revolusi industri 4.0. Perubahan dan inovasi menjadi sebuah keniscayaan agar pola kerja serta pola pelayanan terhadap *stakeholder* dapat diterima dengan mudah dan disambut baik. Maka dari itu sistem *e-government* ini mulai diterapkan dibidang pendidikan dan berbagai instansi pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditempuh melalui jalur formal saja, melainkan juga dapat ditempuh melalui jalur non-formal.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa : “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Dari pernyataan tersebut pendidikan non formal hadir untuk menunjang pendidikan formal yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 26 ayat (1 dan 2) bahwa :

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendudukkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi manusia agar dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal. Salah satu instansi yang bertugas menyelenggarakan pelatihan ialah Puslatbang PKASN LAN (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara) yang berada di Jatinangor, Sumedang. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pelatihan diantaranya kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS disebutkan bahwa “diklat merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”.

Disebutkan pula bahwa tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan adalah

(1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, (2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, (3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, (4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sendiri sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan terkait dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Diantaranya tercatat dalam Peraturan LAN (PERLAN) No 12 Tahun 2008 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Sipil Negara Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan

Tin Febriyanti, 2020

PENGELOLAAN PELATIHAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SILAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa “Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang”. Maka dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS ditujukan untuk terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya masing-masing.

Suatu pelatihan seyogyanya perlu dikelola dengan maksimal karena menjadi salah satu factor penentu keberhasilan dan tujuan pelatihan. Maka pengelolaan dalam sebuah pelatihan merupakan hal yang penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “definisi kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, mengatur, menyeleggarakan, mengurus, serta menjalankan. Sedangkan pengertian pengelolaan merupakan proses, cara, perbuatan mengelola”. Kemudian Moekijat (2000, hlm. 1) mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Pergeseran pelayanan kearah pola pelayanan digital yang lebih cepat, tepat, *ontime*, *paperless*, serta dalam genggaman menjadi tombak terlahirnya aplikasi SILAT (Sistem Informasi dan Pelatihan). Puslatbang PKASN terutama bidang Latbang (Pelatihan dan Pengembangan) telah berupaya untuk menjawab tantangan pada era digital melalui aplikasi SILAT. Tiga hal yang menjadi tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu Pertama, memudahkan peserta pelatihan dalam melakukan pendaftaran serta penyelenggara dalam menginventarisir calon peserta pelatihan. Kedua, memudahkan peserta pelatihan, widyaiswara dan penyelenggara dalam proses pelatihan. Ketiga, menginventarisir peserta pelatihan dengan baik dan lengkap secara online dan mudah diakses setelah pelaksanaan pelatihan.

Puslatbang PKASN melalui misinya yaitu menyelenggarakan diklat dan membina badan diklat secara berkualitas adalah salah satu kunci akan tata kelola pemerintahan. Hadirnya aplikasi SILAT diharapkan menjadi inspirasi bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melaksanakan pelatihan mulai dari jabatan

Tin Febriyanti, 2020

PENGLOLAAN PELATIHAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SILAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Eselon IV hingga Eselon II serta bagi para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan LATSAR (Pelatihan Dasar) untuk dapat berinovasi diinstansinya masing-masing. Tentunya hal tersebut akan dapat membawa hal positif bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Aplikasi SILAT ini memiliki banyak arti penting dikarenakan selama ini pelaksanaan penyelenggaraan kediklatan dan pelatihan memiliki kompleksitas kegiatan yang cukup tinggi. Bila dijabarkan pekerjaan pelayanan dalam kediklatan dan pelatihan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting. Pertama, pelayanan internal yang terdiri dari kegiatan terkait kelengkapan administratif, perencanaan kegiatan, TOR, pertanggungjawaban, dan laporan sebanyak 30%. Kedua, pelayanan ke peserta yang terdiri dari pelayanan akademik maupun pelayanan non akademik sebanyak 50%. Serta ketiga, pelayanan ke widyaiswara yang terdiri dari pelayanan kepada widyaiswara, narasumber, penceramah dan penguji berupa penjadwalan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sebanyak 20%.

Semua kategori tersebut tentunya harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sedangkan jumlah pegawai pada bidang Latbang saat ini hanya berjumlah 20 orang dan harus mengelola sebanyak 26 kegiatan pada tahun 2019 dengan rata-rata jumlah peserta disetiap kegiatan berjumlah 40 orang. Bila dijumlahkan ada sekitar 1000 orang yang harus dilayani dalam waktu 1 tahun dengan rentang waktu pelayanan maksimal 2 bulan untuk setiap kegiatan. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Bila tidak didukung dengan teknologi maka rasio antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai menjadi hal yang vital untuk pertama kali dipecahkan.

Melalui aplikasi SILAT ini hal tersebut diharapkan dapat diatasi, karena beban pekerjaan sudah berkurang mencapai 40% melalui otomatisasi yang sudah diterapkan pada aplikasi ini. bagi peserta pelatihan sendiri adanya aplikasi SILAT diharapkan dapat memberi inovasi yang dapat diterapkan diinstansinya masing-masing. Melalui berbagai kemudahan yang ada pada aplikasi ini akan membuat mereka lebih fokus pada substansi pelatihan daripada hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pelatihan. Dan didalam aplikasi SILAT terdapat beberapa modul

Tin Febriyanti, 2020

PENGLOLAAN PELATIHAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SILAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelayanan dengan 5 antarmuka yang berbeda. Ada antarmuka bagi Penyelenggara, bagi Peserta, bagi Widyaiswara, bagi *Coach*, dan bagi Peguji. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti mengenai “Pengelolaan Pelatihan Melalui Penggunaan Aplikasi SILAT Pada Pelatihan Dasar CPNS (Studi Deskriptif di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor Sumedang Tahun 2020)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kediklatan dan pelatihan di Puslatbang PKASN yang diselenggarakan bidang Latbang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dimana pegawai bidang Latbang hanya ada sekitar 20 orang. sehingga peserta pelatihan tidak dapat terlayani dengan maksimal.
2. Terdapat 26 kegiatan pelatihan pada tahun 2019 yang harus dilaksanakan, sehingga penyelenggara kesulitan untuk mengelola semua kegiatan tersebut, yang dimana setiap kegiatan pelatihan harus dilayani dalam rentang waktu maksimal selama 2 bulan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kegiatan pelatihan melalui penggunaan aplikasi SILAT pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan kegiatan pelatihan melalui penggunaan aplikasi SILAT pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor?

1.3 Tujuan Penelitian

Merajuk dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tin Febriyanti, 2020

PENGLOLAAN PELATIHAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SILAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kegiatan pelatihan melalui penggunaan aplikasi SILAT pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kegiatan pelatihan melalui aplikasi SILAT pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan keilmuan Pendidikan Masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak Puslatbang PKASN LAN sebagai lembaga pengelola pelatihan.
 - b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penulisan Skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka
Pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2019, hlm.24) bagian ini menunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Yaitu

berisikan tinjauan teoritis yang menjadi landasan atau acuan dalam analisis pembahasan masalah penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2019, hlm.26) bagian ini mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrument yang digunakan, tahap pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2019, hlm.29) bagian ini menyampaikan dua hal, yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V Simpulan Implikasi dan Rekomendasi

Pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2019, hlm.35) bagian ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.